



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 22 Seri A);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 8 Seri A);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp25.314.485.396.100,00 bertambah sejumlah Rp3.216.487.242.225,00 sehingga menjadi Rp28.530.972.638.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah:

a). Semula	Rp. 15.851.202.863.984,00	
b). Bertambah/ (berkurang)	Rp. (436.061.925.266,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp 15.415.140.938.718,00

2. Dana Perimbangan:

a). Semula	Rp. 2.528.916.817.680,00	
b). Bertambah/ (berkurang)	Rp. 517.304.781.463,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp 3.046.221.599.143,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

a). Semula	Rp. 5.534.365.714.436,00	
b). Bertambah/ (berkurang)	Rp. (13.829.122.000,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp 5.520.536.592.436,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp 23.981.899.130.297,00

b. Belanja Daerah, terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja Pegawai:

1) Semula Rp. 1.750.356.995.858,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 28.333.302.227,12

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 1.778.690.298.085,12

b) Belanja Bunga:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp 0,00

c) Belanja Subsidi:

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp 20.000.000.000,00

d) Belanja Hibah:

1) Semula Rp. 7.154.144.995.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 489.715.867.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 7.643.860.862.000,00

e) Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp. 12.000.000.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 5.000.000.000,00Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah
Perubahan Rp 17.000.000.000,00f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa:

1) Semula Rp. 6.134.790.633.400,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 462.448.139.235,00Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa Setelah Perubahan Rp 6.597.238.772.635,00

g) Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula Rp. 4.448.668.800.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 1.095.682.092.459,00Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah
Perubahan Rp 5.544.350.892.459,00

h) Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp. 117.000.000.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (31.702.003.092,00)Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah
Perubahan Rp. 85.297.996.908,00Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah
Perubahan Rp. 21.633.625.780.720,12

2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai:

1) Semula Rp. 237.420.693.895,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 12.767.644.153,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 250.188.338.048,00

b) Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula Rp. 2.656.963.529.978,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 332.938.575.876,00Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah
Perubahan Rp. 2.989.902.105.854,00

c) Belanja Modal:

1) Semula Rp. 2.232.412.684.969,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 593.740.464.615,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 2.826.153.149.584,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 6.119.056.634.853,00

c. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

a) Semula Rp. 1.400.000.000.000,00

b) Bertambah/
(berkurang) Rp. 3.149.073.508.028,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 4.549.073.508.028,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

a) Semula Rp. 500.000.000.000,00

b) Bertambah/
(berkurang) Rp. 160.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 660.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 3.889.073.508.028,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 145.868.219.659,88

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Oktober 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 93 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Jessy R. Miralda, SH., MH.
NIK 19360531 197603 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 93 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 OKTOBER 2015
TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH (KURANG)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pajak Daerah				
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	15,851,202,863,984.00	15,415,140,938,718.00	(436,061,925,266.00)	(2.75)
4.1.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14,942,465,917,000.00	14,276,480,327,000.00	(665,985,590,000.00)	(4.46)
4.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5,376,430,000,000.00	5,224,253,000,000.00	(152,177,000,000.00)	(2.83)
4.1.1.06	Pajak Air	5,321,449,000,000.00	4,441,202,000,000.00	(880,247,000,000.00)	(16.54)
4.1.1.06.01	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan	2,474,532,417,000.00	2,258,981,957,000.00	(215,550,460,000.00)	(8.71)
4.1.1.07	Pajak Rokok	48,116,000,000.00	50,479,000,000.00	2,363,000,000.00	4.91
4.1.1.07.01	Pajak Rokok	48,116,000,000.00	50,479,000,000.00	2,363,000,000.00	4.91
		1,721,938,500,000.00	2,301,564,370,000.00	579,625,870,000.00	33.66
		1,721,938,500,000.00	2,301,564,370,000.00	579,625,870,000.00	33.66
4.1.2	Retribusi Daerah	62,037,466,984.00	59,015,099,855.00	(3,022,367,129.00)	(4.87)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	31,425,860,000.00	32,860,643,200.00	1,434,783,200.00	4.57
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12,049,000,000.00	12,746,783,200.00	697,783,200.00	5.79
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	14,413,000,000.00	15,150,000,000.00	737,000,000.00	5.11
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pendidikan	4,963,860,000.00	4,963,860,000.00		
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	18,515,606,984.00	19,970,296,655.00	1,454,689,671.00	7.86
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8,004,085,600.00	8,163,189,000.00	159,103,400.00	1.99
4.1.2.02.04	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	154,521,384.00	154,521,384.00		
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3,875,000,000.00	3,020,000,000.00	(855,000,000.00)	(22.06)
4.1.2.02.06	Retribusi Penyebrangan di Air	31,000,000.00	60,336,271.00	29,336,271.00	94.63
4.1.2.02.08	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	6,451,000,000.00	8,572,250,000.00	2,121,250,000.00	32.88
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	12,096,000,000.00	6,184,160,000.00	(5,911,840,000.00)	(48.87)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Trayek	1,062,000,000.00	1,165,051,000.00	103,051,000.00	9.70
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Usaha Perikanan	90,000,000.00	80,000,000.00	(10,000,000.00)	(11.11)
4.1.2.03.03	Retribusi Perpanjangan IMTA	10,944,000,000.00	4,939,109,000.00	(6,004,891,000.00)	(54.87)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	277,345,935,000.00	278,699,785,000.00	1,353,850,000.00	0.49
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	276,975,935,000.00	278,329,785,000.00	1,353,850,000.00	0.49
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah	6,784,000,000.00	6,814,481,000.00	30,481,000.00	0.45
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Bank	270,191,935,000.00	271,515,304,000.00	1,323,369,000.00	0.49
4.1.3.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan Milik Swasta	370,000,000.00	370,000,000.00		
4.1.3.03.02	2. PT. Bangun Askrida	370,000,000.00	370,000,000.00		
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	569,353,545,000.00	800,945,726,863.00	231,592,181,863.00	40.68
4.1.4.02	Jasa Giro	32,080,000,000.00	23,080,000,000.00	(9,000,000,000.00)	(28.05)

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H				PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH (KURANG)	%	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	500,000,000,000.00	660,000,000,000.00	160,000,000,000.00	32.00	
6.2.2	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	450,000,000,000.00	610,000,000,000.00	160,000,000,000.00	35.56	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	450,000,000,000.00	610,000,000,000.00	160,000,000,000.00	35.56	
6.2.2.02.01	PD Jasa dan Kepariwisataan		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00	
6.2.2.02.03	PT Jasa Sarana Jawa Barat	150,000,000,000.00	250,000,000,000.00	100,000,000,000.00	66.67	
6.2.2.02.07	PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00			
6.2.2.02.17	PT Jamkrida Jabar		45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	100.00	
6.2.4	Dana Bergulir	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00			
6.2.4.01	Dana Bergulir (KCR)	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00			
	PEMBIAYAAN NETTO	900,000,000,000.00	3,889,073,508,028.00	2,989,073,508,028.00	332.12	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	60,727,063,000.00	145,868,219,659.88	85,141,156,659.88	140.20	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

KODE REKENING										U R A I A N		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
1										2		3	4	JUMLAH	%	7	
1	01	01	00	00	5					BELANJA							
1	01	01	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG		296,586,529,520.00	294,437,810,220.00	(2,148,719,300.00)	(0.72)		
1	01	01	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI		296,586,529,520.00	294,437,810,220.00	(2,148,719,300.00)	(0.72)		
1	01	01	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan		139,220,949,520.00	150,622,510,220.00	11,401,560,700.00	8.19		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji pokok PNS/ Uang Representasi		105,839,250,000.00	117,094,640,000.00	11,255,390,000.00	10.63		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Istri/Suami PNS		8,214,445,200.00		-	-		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Anak PNS		4,635,072,000.00	2,804,464,000.00	(1,830,608,000.00)	(39.49)		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Jabatan PNS		431,457,000.00	431,457,000.00	-	-		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional PNS		10,157,381,000.00	10,952,317,500.00	794,936,500.00	7.83		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Umum PNS		1,011,019,100.00	1,289,542,800.00	278,523,700.00	27.55		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan Beras PNS		6,480,564,480.00	6,723,907,320.00	243,342,840.00	3.75		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	08	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2,449,232,500.00	3,107,260,000.00	658,027,500.00	26.87		
1	01	01	00	00	5	1	1	01	09	Pembulatan Gaji PNS		2,528,240.00	4,476,400.00	1,948,160.00	77.06		
1	01	01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS		157,365,580,000.00	143,815,300,000.00	(13,550,280,000.00)	(8.61)		
1	01	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		133,847,880,000.00	119,625,600,000.00	(14,222,280,000.00)	(10.63)		
1	01	01	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya		23,517,700,000.00	24,189,700,000.00	672,000,000.00	2.86		
1	01	01	00	00	5	2				BELANJA LANGSUNG		120,949,868,180.00	151,623,095,906.00	30,673,227,726.00	25.36		
1	01	01	01							Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		20,983,389,775.00	21,621,397,015.00	638,007,240.00	3.04		
1	01	01	01	01						Melaksanakan Festival dan Lomba Kesiswaan (Olimpiade Sains, Seni dan Olah Raga)		8,508,677,000.00	7,591,538,390.00	(917,138,610.00)	(10.78)		
																Lokasi: Jawa Barat	
																Sumber Dana: PAD	
1	01	01	01	01	5	2	1			BELANJA PEGAWAI		172,350,000.00	172,350,000.00	-	-		
1	01	01	01	01	5	2	1	01		Honorarium PNS Provinsi		67,450,000.00	93,400,000.00	25,950,000.00	38.47		
1	01	01	01	01	5	2	1	01	02	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		67,450,000.00	93,400,000.00	25,950,000.00	38.47		
1	01	01	01	01	5	2	1	02		Honorarium PNS Non Provinsi		79,900,000.00	72,400,000.00	(7,500,000.00)	(9.39)		
1	01	01	01	01	5	2	1	02	01	Uang Saku		18,900,000.00	16,800,000.00	(2,100,000.00)	(11.11)		
1	01	01	01	01	5	2	1	02	02	Uang Pengganti Transport Peserta		61,000,000.00	55,600,000.00	(5,400,000.00)	(8.85)		
1	01	01	01	01	5	2	1	04		Uang Lembur		25,000,000.00	6,550,000.00	(18,450,000.00)	(73.80)		
1	01	01	01	01	5	2	1	04	01	Uang Lembur PNS		25,000,000.00	6,550,000.00	(18,450,000.00)	(73.80)		
1	01	01	01	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA		8,336,327,000.00	7,419,188,390.00	(917,138,610.00)	(11.00)		
1	01	01	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		285,225,000.00	346,408,000.00	61,183,000.00	21.45		
1	01	01	01	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor		30,835,000.00	38,668,000.00	7,833,000.00	25.40		
1	01	01	01	01	5	2	2	01	09	Belanja Kit pelatihan		89,640,000.00	89,040,000.00	(600,000.00)	(0.67)		
1	01	01	01	01	5	2	2	01	15	Belanja Plakat/Vandel/Plak/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir		49,750,000.00	52,700,000.00	2,950,000.00	5.93		
1	01	01	01	01	5	2	2	01	16	Belanja Dokumentasi dan Publikasi		89,900,000.00	136,850,000.00	46,950,000.00	52.22		
1	01	01	01	01	5	2	2	01	17	Belanja Peralatan/Perlengkapan Olah Raga Pakai Habis		25,100,000.00	29,150,000.00	4,050,000.00	16.14		
1	01	01	01	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material		16,600,000.00	28,000,000.00	11,400,000.00	68.67		
1	01	01	01	01	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan		16,600,000.00	28,000,000.00	11,400,000.00	68.67		
1	01	01	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		892,900,000.00	1,147,350,000.00	254,450,000.00	28.50		
1	01	01	01	01	5	2	2	03	23	Belanja Jasa Profesi		837,900,000.00	1,042,350,000.00	204,450,000.00	24.40		
1	01	01	01	01	5	2	2	03	25	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	-		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00		
1	01	01	01	01	5	2	2	03	31	Belanja Jasa Penjahitan/Konveksi		55,000,000.00	85,000,000.00	30,000,000.00	54.55		
1	01	01	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan		197,732,000.00	216,782,000.00	19,050,000.00	9.63		
1	01	01	01	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak		164,582,000.00	164,582,000.00	-	-		
1	01	01	01	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan/Fotocopy		33,150,000.00	52,200,000.00	19,050,000.00	57.47		

KODE REKENING										U R A I A N		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
1										2		3	4	JUMLAH 5 = 4 - 3	% 6	7
2	07	01	95	12	5	2	2	20		Belanja Jasa Konsultansi		161,100,000.00	50,000,000.00	(111,100,000.00)	(68.96)	
2	07	01	95	12	5	2	2	20	07	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal		161,100,000.00	50,000,000.00	(111,100,000.00)	(68.96)	
										JUMLAH BELANJA		137,670,765,533.00	142,345,224,020.00	4,674,458,487.00	3.40	
										(DEFISIT)		(122,707,765,533.00)	(126,695,224,020.00)	(3,987,458,487.00)	3.25	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 93 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 OKTOBER 2015

TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

HIBAH UANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	Hibah kepada Pemerintah Pusat		
1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat	Jl. Surapati No. 122 Bandung	20.200.000.000,00
2	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat	Jalan Garut Nomor 11 Bandung	3.000.000.000,00
3	Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Jawa Barat		2.750.000.000,00
4	Kepolisian Daerah Jawa Barat	Jl. Soekarno-Hatta No. 748 Bandung	7.533.000.000,00
5	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat	Jalan Turangga No. 20 Bandung	1.000.000.000,00
6	Kodam III/Siliwangi	Jl Seram No. 9a Kota Bandung	11.500.000.000,00
	- Operasional		
	- Renovasi Venue Squash (Rp4.350.270.000,00)		
	- Rehabilitasi Venue Kriket (Rp. 1.266.276.000,00)		
	- Renovasi Venue Bowling (433.191.000,00)		
	- Renovasi Venue Bilyard (Rp450.263.000,00)		
7	Universitas Pendidikan Indonesia	JL.Dr Setiabudi No. 229	21.650.000.000,00
	- Rehabilitasi venue Sepaktakraw (Rp5.500.000.000,00)		
	- Renovasi venue Hockey In Door (Rp8.000.000.000,00)		
	- Rehabilitasi kolam Renang (Rp6.400.000.000,00)		
	- Rehabilitasi lapangan Softball Putri(Rp750.000.000,00)		
	- Penataan Lingkungan sekitar Venue UPI (Rp1.000.000.000,00)		
8	Lanud TNI - AU Sulaeman, Renovasi Venue Aeromodelling	Jl. Terusan Kopo Sayati Kab. Bandung	6.800.000.000,00
9	Pusat Kesenjataan Kavaleri - TNI AD, Parangpong	Renovasi venue Berkuda Cross Country	4.400.000.000,00
10	Lanud TNI - AU Suryadharma	Jl. Protokol No. 1 Kalijati, Subang	5.200.000.000,00
11	Penunjang Operasional TNI Manunggal Membangun Desa dan BSMSS		85.000.000,00
12	Universitas Padjadjaran (UNPAD) dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Dampak Kekeringan dan Anomali Cuasa kepada Para Petani di Jawa Barat (Wilayah Kab. Kuningan)		801.375.000,00
	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		
13	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat	Jl. Ir. H. Juanda (Dago) No. 19 Bandung	2.000.000.000,00
14	Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	500.000.000,00
15	Pengelola Gedung Merdeka	Jln. Asia-Afrika No. 65 Bandung	2.000.000.000,00
16	Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKJUR	Gedung Mitra Praja Jl. Sunter Permai Raya No. 1 Lt. 3 Jakarta Utara	2.500.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG
1	2	3	4
20	SANGGAR MEKAR WANGI SALUYU	Dusun Cigedug Desa Cigedug Kaler Kec Cigedung KAbupaten Garut	Kacapi Elektrik Tas Kacapi Kunci Kacapi Qiup
21	SANGGAR SENI PANGLIPIUR	RT.01/RW.04 Desa Karayunan Kec. Cigasong Kabupaten Majalengka.	Kacapi Elektrik Tas Kacapi Kunci Kacapi Qiup
22	LINGKUNG SENI PURBASARI	Alamat Lingkungan Lumajang rw 06 Kelurahan Cipawitra Kec MANGkubumi Kota Tasikmalaya	Kacapi Elektrik Tas Kacapi Kunci Kacapi Qiup
23	SANGGAR SENI LESTARI BUDAYA	Kelurahan Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.	Kacapi Elektrik Tas Kacapi Kunci Kacapi Qiup
24	LINGKUNG SENI GAPURA EMAS	Jl. Pahlawan No 30 rt/rw 004/004 Kel Nagrak Selatan Kec. Nagrak KAbupaten Sukabumi.	Kacapi Elektrik Tas Kacapi Kunci Kacapi Qiup
25	LINGKUNG RINGKANG NONOMAN	Jl. Jalan Panji Kartadara Selatan No. 215 Rt 68 RW 12 Kel Cigadung Subang.	Kacapi Elektrik Tas Kacapi Kunci Kacapi Qiup
26	LINGKUNG SENI GOJEH	Jl. Jatinegara No. 148 RT. 06 RW. 02 Kel. Kebon Waru Kec Batu Nunggal Bandung	Kacapi Elektrik Tas Kacapi Kunci Kacapi Qiup
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN			
85.01.Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap			
1	KUB PUTRA BAHARI (Ketua : Sirad)	Dsn. Pasir Putih, Ds. Sukajaya, Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang	Pembangunan Rumah Ikan

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 93 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 OKTOBER 2015

TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	Bantuan Sosial		17.000.000.000,00
	A. Bantuan Sosial yang Belum Direncanakan		5.157.500.000,00
	B. Bantuan Sosial yang Sudah Direncanakan :		11.842.500.000,00
	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas		
	Bantuan UEP bagi disabilitas		
1	Asbi Mauludin	Jl. Bhineka Karya Rt 002 Rw 006 Kelurahan Karamat Kota Sukabumi	2.000.000,00
2	Aisyah	Jl. Merdeka Kp. Tegal Laya Rt 001 Rw 009 Kelurahan Cipanengah Kota Sukabumi	2.000.000,00
3	Agus	Rawa Gede Rt 003 Rw 005 Kelurahan Cikundul Kota Sukabumi	2.000.000,00
4	Dini Sudiani	Jl. Bhayangkara Gg Beringin Rt 003 Rw 014 Kelurahan Sriwedari Kota Sukabumi	2.000.000,00
5	Evi Puspitasari	Jl. Arif Rahman Hakim No. 93 Rt 002 Rw 014 Kelurahan Benteng Kota Sukabumi	2.000.000,00
6	Joni Sutami	Jl. Bhayangkara Gg Sabani Rt 002 Rw 014 Kelurahan Sriwedari Kota Sukabumi	2.000.000,00
7	Mulya Warman	Jl. Pembangunan Selakaso Rt 002 Rw 003 Kelurahan Babakan Kota Sukabumi	2.000.000,00
8	Nyai Kartini	Joglo Rt 001 Rw 003 Kelurahan Cikundul Kota Sukabumi	2.000.000,00
9	Nuryani Aprilianti	Kibitay Rt 004 Rw 008 Kelurahan Situ Mekar Kota Sukabumi	2.000.000,00
10	Lisdiawati	Jl. Tipar Gg Arayana Rt 003 Rw 007 Kelurahan Tipar Kota Sukabumi	2.000.000,00
11	Oman Supriatna	Sukamanah Rt 003 Rw 007 Kelurahan Babakan Kota Sukabumi	2.000.000,00
12	Hikmat Maulana	Ranca Kadu Rt 001 Rw 003 Kelurahan Babakan Kota Sukabumi	2.000.000,00

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	Bantuan Untuk Keluarga Pahlawan Nasional		
	R. Otto Iskandar Dinata/ Jd Djuliah Nucholis	Jln. Parawisata No. 11 RT 01/03 Sukawarna Sukajadi Kota Bandung	9.000.000,00
	Abdul Moeis/ Achmad Hasan Moeis	Jl. Jurang No. 5 Rt. 06/06 Kel. Pasteur Sukajadi Kota Bandung	9.000.000,00
	Kh. Noer Ali Kh. Amin Noer, Lc	Kampung Ujung Harapan RT 04/02 Bahagia Babelan Kab. Bekasi	9.000.000,00
	Kh. Zainal Mustofa Hj. Atik Atikah	Pompes Sukamanah RT 13/III Ds. Sukarapih Kec. Sukarama Kab. Tasikmalaya	9.000.000,00

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN